



**LEGALISASI PRAKTIK ABORSI DALAM ATURAN HUKUM POSITIF
INDONESIA SEBAGAI MEKANISME PERLINDUNGAN HAK
OTONOMI TUBUH BAGI PEREMPUAN YANG MENGALAMI
KEHAMILAN TIDAK DIINGINKAN (KTD)**

Oleh:

Febriwandi Sanjaya Syaputra¹ dan Raden Ajeng Antari Innaka Turingsih²

INTISARI

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai seberapa jauh mekanisme perlindungan hak otonomi tubuh yang di titik beratkan untuk melindungi perempuan korban perkosaan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD) untuk mengakses aborsi. Penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh hukum kesehatan dan hukum perdata di Indonesia bagi dokter yang menjalankan prinsip-prinsip bioetika pada saat menangani korban perkosaan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD).

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan Penelitian ini juga didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara Penulis dengan narasumber yang terdiri atas akademisi hukum kesehatan, praktisi kedokteran, dan lulusan fakultas psikologi. Pada penelitian yang Penulis lakukan, seluruh bahan penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, praktik aborsi merupakan suatu perbuatan yang di kriminalisasi untuk dilakukan, namun terdapat pengecualian untuk melakukan aborsi, yaitu bagi perempuan yang mengalami indikasi kedaruratan medis atau bagi perempuan korban perkosaan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD). Kedua, aturan hukum positif yang berlaku saat ini belum mampu memberikan perlindungan bagi dokter maupun perempuan, secara khusus pada saat menangani praktik aborsi terhadap kehamilan tidak diinginkan (KTD) yang dialami akibat menjadi korban perkosaan.

Kata kunci: Praktik Aborsi, Perempuan Korban Perkosaan, Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), Dokter, Bioetika, Hak Otonomi Tubuh.

¹ Mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum pada Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen pada Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



**THE LEGALIZATION OF ABORTION IN INDONESIAN POSITIVE LAW AS
A MECHANISM TO PROTECT THE RIGHT TO BODILY AUTONOMY FOR
WOMEN WHO EXPERIENCE UNWANTED PREGNANCIES**

By:

Febriwandi Sanjaya Syaputra³ and Raden Ajeng Antari Innaka Turingsih⁴

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of knowing and analyzing how far the mechanism of protection of bodily autonomy rights that are focused on protecting woman victim of rape who experienced unwanted pregnancies to access abortion. This research is also intended to find out the protection provided by health law and civil law in Indonesia for doctors who carry out bioethical principles when dealing with rape victims who experience unwanted pregnancies.

This research is a prescriptive normative research. This research is conducted through literature study to obtain secondary data and this research is also supported by secondary data obtained from the results of the author's interviews with resource persons consisting of health law academics, medical practitioners, and psychology faculty graduates. In the research that the author conducted, all research materials were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this research indicate that first, the practice of abortion is criminalized, but there are exceptions to abortion, namely for women who experience indications of medical emergencies or for women victims of rape who experience unwanted pregnancies. Second, the current positive law has not been able to provide protection for doctors and women, especially when handling abortion practices against unwanted pregnancies experienced as a result of being a victim of rape.

Keywords: *Abortion Practices, Female Rape Victims, Unwanted Pregnancy, Doctors, Bioethics, Bodily Autonomy Rights.*

³ Undergraduate Student at the Civil Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Lecturer at the Civil Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.